

Nomor : S-013/DIR/BPR-KK/I/2024
Lampiran : -

Bogor, 17 Januari 2024

Kepada Yth,
DPP PERBARINDO
Komplek Patra II NO. 46
Jl. Jendral Ahmad Yani Bypass
Cempaka Putih Jakarta Pusat

Perihal : Laporan Tata Kelola BPR Karunia Kanaka Periode Tahun 2023.

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 5/SEOJK.03/2016 tanggal 14 Desember 2020. BPR wajib melaporkan Laporan Tata Kelola paling sedikit kepada:

- Otoritas Jasa Keuangan
- Asosiasi BPR di Indonesia
- 1 (satu) Kantor Media atau Majalah Ekonomi dan Keuangan
- Homepage BPR bagi yang telah memiliki situs WEB

Bersama ini kami sampaikan Laporan mengenai Tata Kelola BPR Karunia Kanaka Periode Tahun 2023.

Demikian, kami sampaikan agar diterima dengan baik, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT.BPR KARUNIA KANAKA



Lisana, S.
Direktur Utama

LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN
LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA
PT. BPR KARUNIA KANAKA
TAHUN 2023

Bogor, 12 Januari 2024

Disetujui dan ditandatangani oleh:



Lisana, SE
Direktur Utama



Mario Glenn Angouw
Komisaris Utama

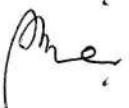
KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : BPR Karunia Kanaka
Alamat : Ruko Sentra Eropa Blok B No 46-47, Kota Wisata. Jl. Transyogi Km. 6, Cibubur
Bogor
No Telp : (021) 84931416
Posisi Laporan : 31 Desember 2023
Modal Inti : Rp. 9.434.691.123,94,-
Total Aset : Rp. 93.547.000.530,25,-
Status Audit : Ya
Bobot BPR : B
Nilai Komposit : 1.2
Peringkat Komposit : 1

KESIMPULAN

Seluruh Kebijakan yang ada di BPR Karunia Kanaka telah dilakukan sesuai dengan Ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan akan dilakukan penyempurnaan secara terus menerus sehingga meminimalisir terjadinya penyimpangan.

Bogor, 12 Januari 2024


Lisana, SE
Direktur Utama


Mario Glenn Angouw
Komisaris Utama

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

PT. BPR Karunia Kanaka

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

665258-2-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-600072-25012024165724

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

admkanaka.aro@gmail.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-25 16:57:24



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Alamat : Ruko Sentra Eropa Blok B No 46-47, Kota Wisata. Jl. Transyogi Km. 6, Cibubur Bogor

Nomor Telepon : 2184931416

Penjelasan Umum : BPR Karunia Kanaka menyadari bahwa Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance GCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola ditujukan antara lain:
Meningkatkan kinerja BPR Karunia Kanaka dengan menyelaraskan segala kegiatan BPR sejalan dengan Visi, Misi dan Rencana Strategi usaha yang telah ditetapkan oleh BPR Karunia Kanaka, Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada Pemegang Saham(Shareholders) dan pemangku kepentingan(Stakeholders), Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang, Menjaga agar kegiatan operasional BPR Karunia Kanaka mematuhi peraturan internal dan eksternal serta perundangan yang berlaku, Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah-nasabah kepada BPR Karunia Kanaka, Memperbaiki Budaya Kerja BPR Karunia Kanaka, Mengelola sumber daya BPR Karunia Kanaka secara lebih tertata dan produktif, Mendorong dan mendukung pengembangan BPR Karunia Kanaka.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Lisana, SE	Direktur Utama	Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan Kepengurusan BPR Karunia Kanaka; Mengelola BPR Karunia Kanaka sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab sebagai mana diatur dalam Anggaran Dasar BPR Karunia Kanaka dan Peraturan perundang-undangan antara lain: Mengimpun dana, Menyalurkan Kredit, Menempatkan dana pada pihak lain, Menerima penempatan dana dari bank lain, Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga non bank; Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR Karunia Kanaka di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR Karunia Kanaka, auditor, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan atau Otoritas lainnya; Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai; Mempertanggungjawabkan pelaksanaab tugasnya kepada Pemegang Saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundangf-undangan; Mengungkapkan kebijakan BPR Karunia Kanaka yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai; Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
2	Jeffrey Nathanael Odiwijaya	Direktur yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional BPR Karunia Kanaka; Membawahkan Fungsi Kepatuhan, Fungsi Manajemen Risiko, dan fungsi APU PPT; Memastikan dan meningkatkan tata tertib dan disiplin kerja; Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Sesuai dengan rekomendasi dari Dewan Komisaris, maka Direksi berkomitmen: Akan menambah SDM untuk menangani bagian Funding dan Penagihan; Berusaha keras untuk meningkatkan produktivitas penyaluran kredit dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian; Meningkatkan Kualitas TKS BPR; Menindaklanjuti hasil temuan Audit, Rekomendasi KAP dan OJK agar BPR Karunia Kanaka semakin baik dan sehat; Terus melakukan pengawasan penerapan Tata Kelola, APU PPT dan Manajemen Risiko yang berkesinambungan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Mario Glenn Angouw	Komisaris Utama	Memastikan terselenggaranya Penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Audit Ekstern (KAP), hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau otoritas lainnya; Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai : Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan, Keadaan dan perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR; Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris; Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.
2	Drs. H. Bambang Setiawan	Komisaris	Memastikan terselenggaranya Penerapan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi; Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Audit Ekstern (KAP), hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan/atau otoritas lainnya; Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai: Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan, keadaan dan perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.

Rekomendasi Kepada Direksi

Direksi diharapkan lebih fokus memperbaiki kinerja BPR, terutama dalam hal : 1). Meningkatkan kinerja SDM dengan menambah jumlah SDM, khususnya untuk bagian Funding dan Penagihan. Meningkatkan kemampuan SDM dengan mengikut-sertakan dalam pelatihan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan. Meningkatkan disiplin dan loyalitas SDM dengan menerapkan pereaturan dan tata tertib yang jelas dan efektif. 2). Meningkatkan produktivitas penyaluran kredit dengan tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian. Meningkatkan mitigasi kredit Fintech dan lebih berhati-hati dalam memilih mitra Fintech. Meningkatkan kinerja penyelesaian kredit bermasalah, AYDA dan Hapus Buku. Memperbaiki kinerja bagian penagihan kredit dengan strategi yang lebih terencana, terukur, terpantau dan berorientasi pada hasil. 3). Meningkatkan penghimpunan dana dengan mengangkat Funding Officer yang berkompetensi dan memiliki jaringan potensial. Membuat produk-produk tabungan dan deposito yang menarik dan kompetitif. Mengembangkan relationship dengan calon-calon nasabah perorangan maupun perusahaan yang potensial. 4). Meningkatkan kualitas tingkat kesehatan bank dan mendorong tercapainya target laba dan realisasi RBB. 5). Menindaklanjuti dan menyelesaikan hasil temuan audit dan rekomendasi dari Internal Audit, Eksternal Audit (KAP) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun buku 2023. 6). Melakukan pengawasan yang terkait pada penerapan Tata Kelola, APU dan PPT dan Penerapan Manajemen Risiko secara berkala.

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

BPR tidak memiliki komite

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di BPR

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Direksi tidak memiliki saham di perusahaan lain

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Jeffrey Nathanael Odiwijaya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Lisana, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh Direksi BPR Karunia Kanaka tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Direksi lainnya maupun dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	Lisana, SE	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Jeffrey Nathanael Odiwijaya	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh Direksi BPR Karunia Kanaka tidak memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya maupun dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	Mario Glenn Angouw	18.000.000.000	90,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Salah satu Dewan Komisaris BPR Karunia Kanaka menjadi Pemegang Saham Pengendali dengan nominal sebesar Rp. 18,000,000,000 atau sebesar 90% dari saham yang ada di BPR Karunia Kanaka

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	Mario Glenn Angouw	BPR Dana Raya	65,00
2	Mario Glenn Angouw	BPR Dana Raya Jawa Timur	92,52

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Salah satu Komisaris BPR Karunia Kanaka memiliki saham di 2 BPR lainnya yaitu PT. BPR Dana Raya dan PT. BPR Dana Raya Jawa Timur

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Mario Glenn Angouw	Tidak ada	Tidak ada	Tidak Ada
2	Drs. H. Bambang Setiawan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Seluruh Dewan Komisaris BPR Karunia Kanaka tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dewan Komisaris lainnya maupun dengan anggota Direksi serta Pemegang Saham.

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	Mario Glenn Angouw	Tidak ada	Tidak ada	Ibu Ellen Angouw-Orang Tua
2	Drs. H. Bambang Setiawan	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Salah satu Dewan Komisaris BPR Karunia Kanaka yang bernama Bapak Mario Glenn Angouw memiliki hubungan keluarga dengan Pemegang Saham lainnya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	527600000	2	144000000
2	Tunjangan	2	264399170	2	7200000
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	2	48000000	2	195600000
	Total		839999170		346800000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi dan salah satu Komisaris BPR Karunia Kanaka mendapatkan Gaji Pokok beserta tunjangan dan Remunerasi lainnya berupa THR dan bonus tahunan akan tetapi tidak mendapatkan Tantiem itu dikarenakan selama tahun 2023 BPR Karunia Kanaka mengalami kerugian kumulatif sehingga tidak ada pembagian bonus tahunan, sedangkan untuk Komisaris Utama tidak mendapatkan Gaji Pokok beserta tunjangan, beliau hanya mendapatkan Remunerasi Lainnya.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	Direksi BPR Karunia Kanaka tidak diberikan Fasilitas Perumahan karena lokasi tempat tinggal Direksi berada di kota/Kabupaten yang berdekatan dengan BPR Karunia Kanaka.	Dewan Komisaris BPR Karunia Kanaka tidak diberikan Fasilitas Perumahan karena lokasi tempat tinggal Dewan Komisaris berada di kota/Kabupaten yang berdekatan dengan lokasi BPR Karunia Kanaka
2	Transportasi	Direksi BPR Karunia Kanaka mendapatkan fasilitas Kendaraan operasional yang meliputi BBM, E-toll serta service pemeliharaan kendaraan operasional.	Komisaris Utama BPR Karunia Kanaka diberikan Fasilitas transportasi beserta BBM, Etoll dan Parkir
3	Asuransi Kesehatan	Direksi BPR Karunia Kanaka mendapatkan fasilitas kesehatan berupa BPJS Kesehatan (Rawat inap dan rawat jalan) dan Fasilitas rawat jalan dengan sistem Reimburse dengan plafond sebesar Rp. 8,500,000 per tahun	Dewan Komisaris BPR Karunia mendapatkan fasilitas kesehatan berupa BPJS Kesehatan (Rawat inap dan rawat jalan) dan fasilitas rawat jalan dengan sistem Reimburse dengan total plafond sebesar Rp. 5,500,000 per tahun
4	Fasilitas lainnya	Direksi BPR Karunia Kanaka mendapatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan	Dewan Komisaris BPR Karunia Kanaka mendapatkan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Direksi BPR Karunia Kanaka mendapatkan fasilitas lain berupa Transportasi, BPJS Kesehatan dan Fasilitas Lainnya berupa BPJS Ketenagakerjaan seperti yang tercantum diatas akan tetapi berbeda dengan Dewan Komisaris di BPR karunia Kanaka hanya mendapatkan fasilitas lainnya yaitu berupa BPJS Kesehatan dan fasilitas rawat jalan saja.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3,49	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,38	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,94	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	2,62	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Ratio gaji diatas adalah yang diterima oleh seluruh Karyawan dan pengurus BPR Karunia Kanaka yang dihitung dari Gaji Pokok beserta Tunjangan dalam 1 tahun.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	20-04-2023	4	Hasil pelaksanaan Rencana Bisnis BPR Karunia Kanaka pada Triwulan I tahun 2023 ; Kinerja BPR Karunia Kanaka Triwulan II ; Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola , APU PPT dan Manajemen Risiko di BPR Karunia Kanaka
2	18-07-2023	4	Hasil pengawasan Pengawasan Rencana Bisnis Triwulan II tahun 2023 BPR Karunia Kanaka; Kinerja BPR Karunia Kanaka Triwulan II, Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola, APU PPT dan Manajemen Risiko di BPR Karunia Kanaka
3	18-10-2023	4	Hasil pengawasan Rencana Bisnis Triwulan III tahun 2023 PT. BPR Karunia Kanaka ; Kinerja BPR Karunia Kanaka Triwulan III; Pelaksanaan Penerapan Tata Kelola, APU PPT dan Manajemen Risiko di BPR Karunia Kanaka

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris BPR Karunia Kanaka selalu melaksanakan Rapat Dewan Komisaris minimal dalam 1 tahun dilaksanakan 4 kali, akan tetapi di tahun 2023 Dewan Komisaris melakukan Rapat Dewan Komisaris sebanyak 3 kali

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	Mario Glenn Angouw	3	0	100,00
2	Drs. H. Bambang Setiawan	3	0	100,00

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat per posisi Desember 2023 selalu dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris

Form A.09.00
Jumlah Penyimpangan Internal (Internal Fraud)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Penyimpangan Internal/Fraud tidak terjadi di BPR Karunia Kanaka selama tahun 2023

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BPR Karunia Kanaka selama tahun 2023 tidak mempunyai permasalahan hukum baik secara Perdata maupun secara Pidana

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BPR Karunia Kanaka tidak mempunyai Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20231026	Kegiatan Sosial	Jumat Berkah	Pekerja disekitar Kotawisata	481.000
2	20231123	Kegiatan Sosial	Sedekah Jumat	Pekerja disekitar Kotawisata	481.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

BPR Karunia Kanaka mengadakan Aksi Jumat Berkah berupa pemberian makanan untuk para pekerja seperti Tukang Sapu, Tukang Sampah, Tukang Taman di sekitar Kantor BPR Karunia Kanaka yang biasanya diselenggarakan setiap minggu ke 4 setiap bulannya dan baru berjalan 2 bulan yaitu di bulan Oktober dan November 2023

Nama BPR	: PT. BPR Karunia Kanaka
Posisi Laporan	: 31-12-2023
Alamat	: Ruko Sentra Eropa Blok B No 46-47, Kota Wisata. Jl. Transyogi Km. 6, Cibubur Bogor
Nomor Telepon	: 2184931416
Modal Inti BPR	: 9.434.691.123,00
Total Aset BPR	: 93.547.000.530,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,2
Peringkat Komposit	: 1
Analisis	: Faktor pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris sudah dilakukan secara independent, sehingga segala keputusan yang dilaksanakan selalu menghasilkan keputusan yang bulat untuk dilaksanakan, Direksi dan Komisaris telah memiliki Pedoman Tata Tertib yang mengatur tentang Etika dalam bekerja, Waktu kerja dan peraturan rapat dan semua itu telah disesuaikan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Tidak adanya rangkap jabatan di BPR Karunia Kanaka semuanya berjalan sesuai fungsinya, dan Direksi selalu menindak lanjuti adanya temuan dari audit internal maupun audit eksternal seperti Otoritas Jasa Keuangan. BPR Karunia Kanaka telah memiliki SPO mengenai Benturan Kepentingan dan telah dilakukan sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan agar tidak terdapat benturan kepentingan dari Level Manajemen (Direksi dan Komisaris) sampai ke level Non Staf (Office Boy, Supir dan Satpam). BPR Karunia Kanaka memiliki modal inti dibawah Rp. 50 M, sehingga menunjuk Pejabat Eksekutif untuk melaksanakan penerapan Audit Internal, Audit Internal melaksanakan tugasnya secara independent dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap proses Manajemen Risiko di BPR Karunia Kanaka, karena Aset BPR Karunia Kanaka masih dibawah Rp. 50 M maka ditunjuk Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko di BPR Karunia Kanaka. BPR Karunia Kanaka telah memiliki SPO mengenai Manajemen Risiko dan pelaksanaannya diawasi oleh Komisaris dan harus dilakukan secara berkelanjutan. Batas Maksimum Pemberian Kredit sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan. Rencana Strategis BPR Karunia Kanaka sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non keuangan di BPR Karunia Kanaka sudah baik dan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan seperti laporan keuangan per tiga bulan sekali ataupun 1 tahun sekali.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,50	0,45	0,10	1,05	0.210	Jumlah, Komposisi, integritas dan Kompetensi anggota Direksi serta pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi telah sesuai dengan prinsip Tata Kelola.
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,56	0,40	0,10	1,06	0.159	Dewan Komisaris BPR Karunia Kanaka telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan Prinsip Tata Kelola yang terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris terhadap Kebijakan Direksi, untuk posisi 31 Desember 2023 posisi Dewan Komisaris di BPR Karunia Kanaka sudah lengkap
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	BPR Karunia Kanaka mempunyai Aset dibawah Rp. 50 M, sehingga belum diwajibkan memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	0,50	0,40	0,20	1,10	0.110	Tidak terdapat Benturan Kepentingan di BPR Karunia Kanaka
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	0,50	0,56	0,17	1,23	0.123	Penerapan Fungsi Kepatuhan di BPR Karunia Kanaka telah berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Pejabat Eksekutif kepatuhan telah menjalankan fungsinya secara independent
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,50	0,70	0,15	1,35	0.135	Pelaksanaan Fungsi Audit Intern BPR Karunia Kanaka telah berjalan efektif, pedoman intern sebagai acuan pemeriksaan (Risk Based Audit) telah memenuhi standar minimum yang ditetapkan dan Pejabat Eksekutif Audit Internal telah menjalankan fungsinya secara independent
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,40	0,10	1,00	0.025	Kantor Akuntan Publik telah melaksanakan Audit secara independent dan memenuhi kriteria yang ditetapkan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	0,84	0,68	0,10	1,62	0.162	Penerapan Manajemen Risiko telah dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, namun penetapan limit risiko dan pemantauan profil risiko belum dijalankan dengan baik
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	0,50	0,40	0,25	1,15	0.086	Tidak terdapat pelanggaran dan pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit, namun kebijakan mengenai Penyediaan Dana Besar sedang dalam penyempurnaan
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	0,50	0,40	0,10	1,00	0.075	Rencana Bisnis BPR Karunia Kanaka telah disiapkan sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,50	0,40	0,10	2,00	0.150	Informasi keuangan dan non keuangan telah disampaikan dan dipublikasikan secara transparan kepada pihak-pihak yang ditetapkan
Nilai Komposit						1.2	
Peringkat Komposit						Sangat Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Pengangkatan Direksi BPR Karunia Kanaka berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-80/KR.02/2023 tanggal 26 Juni 2023 dan No. KEP-81/KR.02/2023 tanggal 26 Juni 2023 serta telah di sahkan oleh RUPS dengan Akta Notaris No. 01 tanggal 11 Juli 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Wisrahmalitha Algamar,S.H
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Domisili Direksi PT. BPR Karunia Kanaka telah mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud yakni bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama dan Direktur Utama BPR Karunia Kanaka bertempat tinggal di perbatasan Kota/Kabupaten di Lokasi Kantor BPR Karunia Kanaka
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Direksi BPR Karunia Kanaka sejak awal beroperasi tidak ada yang melakukan rangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain.
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Direksi BPR Karunia Kanaka sejak awal beroperasi tidak ada yang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	1	Direksi BPR Karunia Kanaka tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi BPR Karunia Kanaka telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya berdasarkan Akta Notaris No. 01 tanggal 11 Juli tahun 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Wisrahmalitha Algamar,S.H
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi BPR Karunia Kanaka telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	1	Direksi BPR Karunia Kanaka telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	1	Direksi BPR Karunia Kanaka telah menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Rapat Direksi BPR Karunia Kanaka yang dilaksanakan selalu menghasilkan keputusan yang bulat untuk dilaksanakan
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi BPR Karunia Kanaka tidak menggunakan BPR untuk hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	1	Direksi BPR Karunia Kanaka memandang bahwa SDM adalah Aset perusahaan yang perlu ditumbuhkembangkan
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	2	Direksi BPR Karunia Kanaka mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dan selalu menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk menjaga NPL
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	1	Direksi BPR Karunia Kanaka telah memiliki Tata Tertib Direksi dengan No. 015/SK.DIR/BPR-KK/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 dan melaksanakannya dengan baik
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,13	
	Bobot	0,40	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Proses	0,45	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi BPR Karunia Kanaka mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	1	Direksi BPR Karunia Kanaka senantiasa mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR dibidang kepegawaian
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	1	Direksi BPR Karunia Kanaka senantiasa mendokumentasikan risalah rapat termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam Rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	1	Direksi BPR Karunia Kanaka selalu memiliki kebijakan untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada pegawai menjadikan SDM lebih memahami tugas dan tanggung jawab sesuai bidang kerjanya
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	BPR Karunia Kanaka telah menyampaikan laporan Penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia dan 1 kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	Berdasarkan Modal inti BPR Karunia Kanaka yang kurang dari 50 M maka memiliki Dewan Komisaris sedikitnya 2 (dua) orang. Adapun komposisi Dewan Komisaris BPR Karunia Kanaka, 2 orang sudah lengkap sesuai dengan Akta Notaris No. 11 tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Wisrahmalitha Algamar,S.H
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	Jumlah Dewan Komisaris di BPR Karunia Kanaka Per posisi 31 Desember 2023 sudah sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kematangan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Komisaris BPR Karunia Kanaka sudah lulus Uji Kemampuan dan telah diangkat melalui RUPS sesuai dengan Akta Notaris No. 11 tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Wisrahmalitha Algamar,S.H
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Salah satu komisaris BPR Karunia Kanaka bertempat tinggal di Provinsi yang sama atau di Kota/Kabupaten pada Provinsi lain yang berbatasan langsung dengan Provinsi lokasi Kantor Pusat BPR Karunia Kanaka
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen; BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	Modal inti BPR Karunia Kanaka kurang dari Rp. 50 M jadi belum memiliki Komisaris Independen
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	1	Dewan Komisaris BPR Karunia Kanaka telah memiliki Pedoman Kerja dan Tata Tertib Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 016/SK.DIR/BPR-KK/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Jumlah Dewan Komisaris di BPR Karunia Kanaka Per Posisi 31 Desember 2023 tidak ada yang merangkap lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya.
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Dewan Komisaris di BPR Karunia Kanaka tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Dewan Komisaris di BPR Karunia Kanaka tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	1,11	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,56	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	1	Dewan Komisaris di BPR Karunia Kanaka telah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi dengan sebagaimana mestinya.
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	1	Dewan Komisaris di BPR Karunia Kanaka telah melakukan tugas pengawasan, mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategi BPR.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	1	Dewan Komisaris BPR Karunia Kanaka tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, sehingga harmonisasi kerja terjaga.
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	1	Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi BPR Karunia Kanaka menindaklanjuti seluruh temuan Audit Internal, Audit Eksternal serta hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan atau hasil pengawasan Otoritas lainnya.
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris BPR Karunia Kanaka selalu menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara optimal dan selalu menyelenggarakan rapat-rapat Dewan Komisaris.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	Dalam hal pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR Karunia Kanaka untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil keuntungan dari BPR Karunia Kanaka.
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	1	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	1	Hasil rapat Dewan Komisaris selalu dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas.
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	BPR Karunia Kanaka belum memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite lainnya
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	BPR Karunia Kanaka belum memiliki Komite Audit Intern
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	BPR Karunia Kanaka belum memiliki Komite Pemantau Risiko
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	BPR Karunia Kanaka belum memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko lainnya
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	BPR Karunia Kanaka belum memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	1	BPR Karunia Kanaka telah memiliki Prosedur mengenai benturan kepentingan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomer 004/SK/BPR-KK/III/2017 tanggal 22 Maret 2017
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	1	Telah dilakukan dengan baik
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	2	Telah dilakukan dengan baik
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,20	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.	1	BPR Karunia Kanaka memiliki Modal inti kurang dari Rp. 50 M sehingga anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan memahami Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan
3	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.	1	BPR Karunia Kanaka memiliki Modal inti kurang dari Rp. 50 M sehingga pelaksanaan fungsi Kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 05/SK.DIR/BPR.KK/III/2017
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	1	Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	1	Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah memiliki Jobdesc menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Telah dilakukan sesuai dengan Ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu memastikan BPR Karunia Kanaka telah memenuhi seluruh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Telah dilakukan sesuai dengan Ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu melakukan upaya mendorong terciptanya budaya kepatuhan di BPR Karunia Kanaka
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Telah dilakukan sesuai dengan Ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan yaitu memantau dan menjaga kepatuhan BPR Karunia Kanaka terhadap seluruh Komitmen yang dibuat
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR Karunia Kanaka sesuai dengan ketentuan dari OJK
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan revidi dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Pejabat Eksekutif Kepatuhan telah merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR Karunia Kanaka agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,40	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,56	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	Sesuai dengan target BPR Karunia Kanaka yaitu menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	1	Laporan Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan Dilakukan secara triwulan
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Dilaksanakan apabila ada kebijakan yang menyimpang di BPR Karunia Kanaka
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,17	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	Sesuai dengan Modal Inti BPR Karunia Kanaka yang kurang dari Rp. 50 M maka BPR Karunia Kanaka telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/SK.DIR/BPR-KK/XII/2023 tanggal 19 Desember 2023
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	1	Pejabat Eksekutif Audit Intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistim dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	1	Audit Intern BPR Karunia Kanaka selalu diikutsertakan dalam pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan Audit Intern ataupun pelatihan lainnya guna menambah ilmu sehingga dapat diimplementasikan di BPR Karunia Kanaka
Total nilai skala penerapan		5	
Rata-rata		1,00	
Bobot		0,50	
Nilai struktur		0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	1	BPR Karunia Kanaka telah menerapkan fungsi Audit Intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang disusun

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR Karunia Kanaka memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 M sehingga belum menugaskan pihak intern untuk mengkaji ulang atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	Pelaksanaan fungsi audit intern telah dilaksanakan secara memadai dan independen
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	2	BPR Karunia Kanaka selalu melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern
	Total nilai skala penerapan	7	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,70	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	Pejabat Eksekutif Audit intern BPR Karunia Kanaka bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dan menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Pejabat Eksekutif Audit Intern BPR Karunia Kanaka telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR Karunia Kanaka memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 M sehingga belum menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR Karunia Kanaka memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 M dan telah menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Penugasan Audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada BPR Karunia Kanaka telah memenuhi aspek-aspek legalitas sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	1	BPR Karunia Kanaka telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS dan berdasarkan usulan Dewan Komisaris
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR Karunia Kanaka telah melaporkan hasil Audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	1	Hasil audit dan Management Letter dari KAP telah menggambarkan permasalahan BPR Karunia Kanaka dan disampaikan secara tepat waktu oleh KAP yang ditunjuk
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Hasil Audit dari KAP paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko; BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.	1	BPR Karunia Kanaka memiliki modal inti kurang dari Rp. 50 M, sehingga menunjuk salah satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 019/SK.DIR/BPR.KK/VII/2017
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	1	BPR Karunia Kanaka telah memiliki Prosedur Manajemen Risiko akan tetapi belum memiliki Kebijakan Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	3	BPR Karunia Kanaka belum memiliki prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	1,67	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,84	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.	1	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis serta mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	1	Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	BPR Karunia Kanaka sudah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	2	BPR Karunia Kanaka sudah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR Karunia Kanaka telah menerapkan Manajemen Risiko atas 4 Risiko yaitu Risiko Kredit, Risiko Operasional Risiko Kepatuhan dan Risiko Likuiditas serta dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setiap semester.
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	BPR Karunia Kanaka sudah memiliki sistem informasi tapi belum memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	1	Direksi BPR Karunia Kanaka telah mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM
	Total nilai skala penerapan	12	
	Rata-rata	1,71	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,68	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR Karunia Kanaka telah menyusun laporan profil risiko dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR Karunia Kanaka telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	1	BPR Karunia Kanaka telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK yang terdapat di Pedoman Standar Kebijakan Perkreditan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 014/SK.DIR/BPR-KK/XI/2021 tanggal 01 November 2021
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	1	BPR Karunia Kanaka telah secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	1	BPR Karunia Kanaka telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR Karunia Kanaka telah memberikan Laporan atas kredit kepada pihak terkait dan /atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	3	Ada beberapa debitur yang melampaui BMPK dan telah diberikan surat pemberitahuan dari BPR Karunia Kanaka agar segera melunasi seluruhnya atau melunasi sebagian

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,25	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	1	Rencana Bisnis BPR Karunia Kanaka telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Visi dan Misi BPR
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana Bisnis BPR Karunia Kanaka telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana permasalahan BPR yang signifikan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	1	Rencana Bisnis BPR Karunia Kanaka didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	1	Rencana Bisnis BPR Karunia Kanaka telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	1	Dewan Komisaris BPR Karunia Kanaka telah melaksanakan pengawasan terhadap rencana bisnis
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Rencana Bisnis BPR Karunia Kanaka telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	3	BPR Karunia Kanaka memiliki sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,50	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR Karunia Kanaka telah membuat Laporan publikasi setiap triwulan dan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR Karunia Kanaka telah membuat Laporan publikasi setiap triwulan dan dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang memuat informasi umum, laporan keuangan dan informasi lainnya
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR Karunia Kanaka telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	BPR Karunia Kanaka telah menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan yang diatur sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,40	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Laporan tahunan dan Laporan keuangan publikasi ditandatangani oleh salah satu Direksi dengan mencantumkan nama jelas
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	1	laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai ketentuan dan tepat waktu
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,10	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Karunia Kanaka

Posisi Laporan : 31 Desember 2023